

**DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**

LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun 2020

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 113 Kel.
Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai
Sumatera Utara 20743

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 ini dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Adapun LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Binjai, 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

HEDI NOVRIA, SH
PEMBINA
NIP. 19800422 200604 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	I
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.4. Sumber Daya Aparatur	9
I.5. Sarana dan Prasarana	10
I.6. Sistematika Laporan Kinerja (LK)	14
I.7. Dasar Hukum	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
II.1. Rencana Strategis	17
II.2. Tujuan dan Sasaran	17
II.3. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1. Capaian Kinerja	23
III.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	38

LAMPIRAN :

LAMPIRAN I	INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020
LAMPIRAN II	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. LKj Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Analisa dan bukti – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pemangku yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2019 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data – data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai kedepan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan – persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bias dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai di lingkungan pemerintah Kota Binjai dalam perbaikan pelayanan public di tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai merupakan bagian dari suatu tatanan Pemerintahan di Kota Binjai yang mempunyai peranan membantu Kepala Daerah dalam Pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai harus menyusun laporan kinerja setiap tahun dalam rangka mempertanggungjawabkan atau mengukur sejauh mana keberhasilan maupun kegagalan misi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas yang dibuat haruslah memberikan informasi yang menggambarkan kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, akurat, obyektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (input oriented) menjadi orientasi pada hasil (result oriented) serta dapat di pertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaannya program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha – usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan out put maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dipimpin atau dikepalai oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan Kota Binjai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- d. Pelaksanaan adminstrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan pasar.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. 2. GAMBARAN UMUM

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kota Binjai. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No 113 Binjai 20743.

Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja
 - b. Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja
 - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- 4. Bidang Perindustrian
 - a. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
 - b. Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang dan Aneka dan Kerajinan
 - c. Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut
- 5. Bidang Perdagangan
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
 - b. Seksi Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen
 - c. Seksi Pengelolaan Pasar

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas dibantu oleh :

- 1. Sekretaris
- 2. Kepala Bidang Tenaga Kerja
- 3. Kepala Bidang Perindustrian
- 4. Kepala Bidang Perdagangan

I.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1. **Sekretaris** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan mengkoordinasikan bidang bidang dan urusan umum lainnya.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
- d. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

- e. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas dan fungsi.
- f. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD).
- g. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian Dins.
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- i. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas.
- k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum.
- m. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian.
- n. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset.
- o. Mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan.
- p. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset.
- q. Menginventarisir permasalahan – permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
- s. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

2. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan.
- d. Melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan.
- e. Melakukan penempatan dan informasi pasar kerja.
- f. Melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga latihan kerja.
- g. Melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- h. Mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha.
- i. Merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek.
- j. Melakukan perencanaan hubungan industri.
- k. Mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga kerja.
- l. Menilai hasil kerja bawahan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja.
- b. Melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri.
- c. Melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri, tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri.
- d. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri.
- e. Melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan daya saing, standarisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirasusaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika.
- f. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan standarisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta

promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.

- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan, konsultan, sentra, dan unit pelayananan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perdagangan.

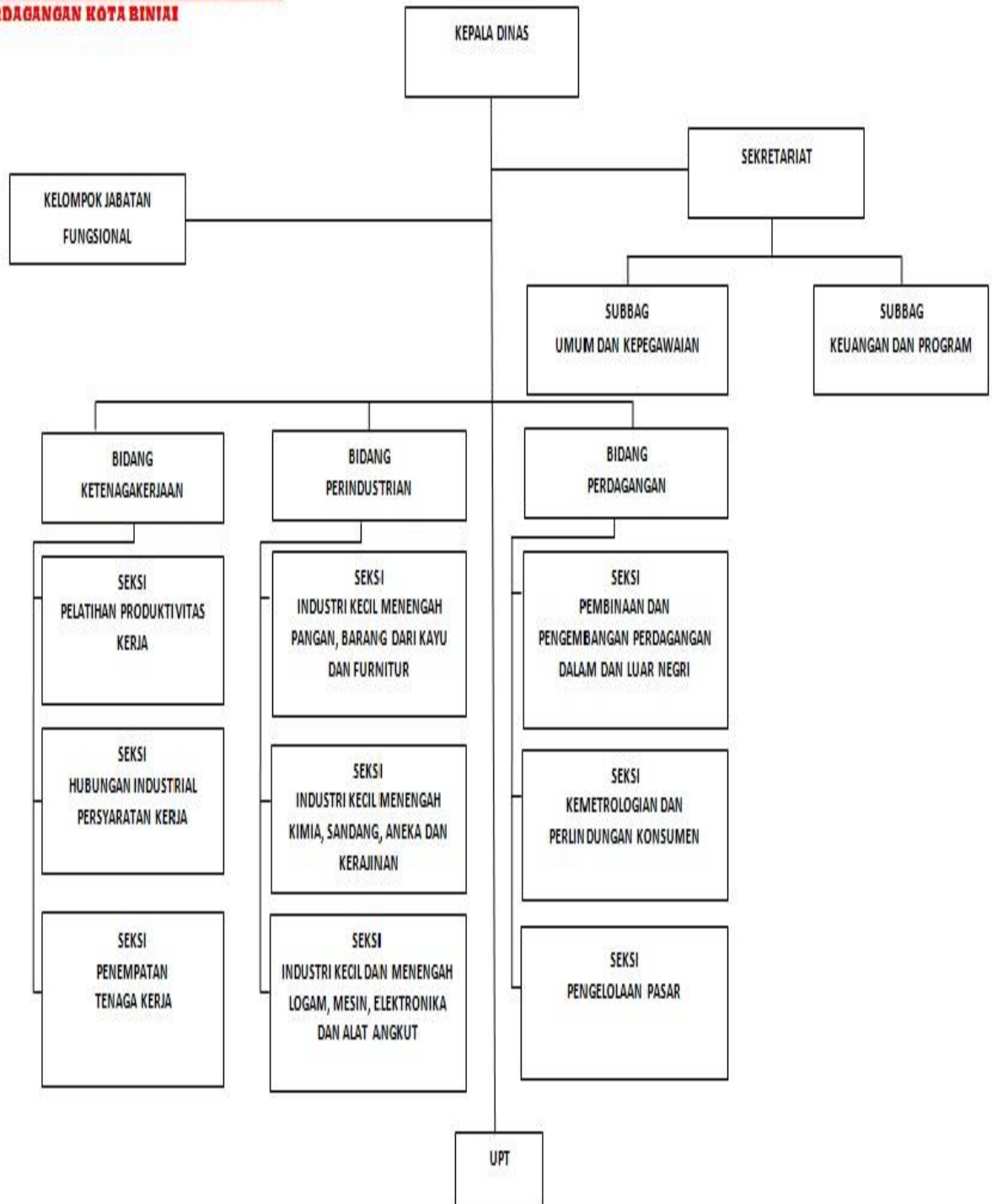
Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan.
- b. Mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap pelaksanaan tugas.
- c. Mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha perdagangan.
- d. Merumuskan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan.
- e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
- f. Mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang perdagangan.
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring, mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung.
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar dagang) skala lokal.
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, serta pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan.
- j. Menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan terbungkus dan sistem internasional.
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan sebagai pertanggungjawaban.

- l. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
5. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** mempunyai tugas pokok dan fungsi yang ditentukan dan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BERIKUT BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINASTENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



I.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan. Untuk mewujudkan misi yang diemban, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai pada Tahun 2020 sebanyak 40 (empat puluh) orang Pegawai (PNS) yang terdiri dari 18 (delapan belas) laki-laki dan 22 (dua puluh dua) perempuan dengan status kepegawaian dan strata/jenjang pendidikan mulai dari SMA hingga S-2. Berikut ini kami sampaikan data kepegawaian seperti terlihat pada tabel berikut ini :

- 🚦 Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS	40
2.	CPNS	-
3.	Honorar	67
	Jumlah	107

No	Golongan	Jumlah
1.	I / b	1
2.	II / a	-
3.	II / b	-
4.	II / c	2
5.	II / d	3
6.	III / a	5
7.	III / b	5
8.	III / c	8
9.	III / d	7
10.	IV / a	7
11.	IV / b	2
12.	IV / c	-
	Jumlah	40

I. 5. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Bangunan Gedung Kantor

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai memiliki 1 bangunan gedung kantor, 1 bangunan gedung UPTD Metrologi Legal yang berada diluar kompleks Pemerintahan Kota Binjai yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 113 Kota Binjai, bangunan tersebut dalam kondisi baik.

b. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang kelancaran mobilitas pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan tersedianya kendaraan dinas, yaitu :

- Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 4 (empat) unit dalam kondisi baik
- Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit kondisi baik
- Truck Sampah Pasar Roda 6 sebanyak 2 (dua) unit kondisi baik

c. Sarana Penunjang Lainnya

Sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diantaranya :

➤ Meja dan Kursi

Semua pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sudah memiliki meja dan kursi masing – masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, semua meja dan kursi berada dalam kondisi baik

➤ Laptop dan Komputer

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditunjang dengan keberadaan laptop dan komputer

➤ Printer

Sarana dan prasarana lainnya seperti printer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga berada dalam kondisi baik

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	1.047.814.246,00	786.952.684,00	(260.861.562,00)	(24,90)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.047.814.246,00	786.952.684,00	(260.861.562,00)	(24,90)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.047.814.246,00	786.952.684,00	(260.861.562,00)	(24,90)
5	BELANJA	7.851.702.119,00	9.611.021.252,00	1.759.319.133,00	22,41
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.492.096.977,00	3.443.125.700,00	(48.971.2277,00)	(1,40)
5.1.1	Belanja Pegawai	3.492.096.977,00	3.443.125.700,00	(48.971.2277,00)	(1,40)
5.2	Belanja Langsung	4.359.605.142,00	6.167.895.552,00	1.808.290.410,00	41,48
5.2.1	Belanja Pegawai	1.542.380.000,00	1.533.230.000,00	(9.150.000,00)	(0,59)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.520.705.442,00	3.219.237.537,00	1.698.532.095,00	111,69
5.2.3	Belanja Modal	1.296.519.700,00	1.415.428.015,00	118.908.315,00	9,17
SURPLUS/ (DEFISIT)		(6.803.887.873,00)	(8.824.068.568,00)	(2.020.180.695,00)	29,69

Untuk mendapatkan kepastian Hukum terutama dalam bidang ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja maka secara rutin melakukan Pengawasan ke Perusahaan dan menindaklanjuti laporan Pekerja dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), begitu juga dalam hal Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Binjai untuk Tahun 2020.

➤ **Perkembangan Upah Minimum Kota Binjai.**

Tahun	UMK
2011	1.050.000,00
2012	1.201.500,00
2013	1.379.000,00
2014	1.560.000,00
2015	1.700.000,00
2016	1.895.500,00
2017	2.051.875,75
2018	2.230.597,39
2019	2.409.714,36
2020	2.614.781,05

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN (%)
1	Maksimum SD	922	3,94 %
2	SLTP	611	2,75 %
3	SLTA Umum	3.056	7,79 %
4	SLTA Kejuruan	3.636	15,47 %
5	Diploma	329	8,99 %
6	Sarjana	1.085	4,73 %
JUMLAH		9.639	

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Golongan Umur Tahun 2020**

NO	UMUR	JUMLAH	PERSEN (%)
1	15 - 19	2.179	25,18 %
2	20 - 24	3.852	21,31 %
3	25 - 29	1.542	7,36 %
4	30 - 34	640	4,18 %
5	35 - 39	234	1,57 %
6	40 - 44	579	3,45 %

7	45 - 49	271	2,12 %
8	50 - 54	141	1,17 %
9	55 - 59	206	2,38 %
10	60 +	66	0,73 %
JUMLAH		9.692	

➤ **Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki - Laki	6.033
2	Perempuan	3.657
JUMLAH		9.690

➤ **Jumlah Pasar Menurut Kecamatan di Kota Binjai**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Binjai Selatan	1
2	Binjai Kota	9
3	Binjai Timur	1
4	Binjai Utara	1
5	Binjai Barat	1
JUMLAH		13

➤ **UTTP Metrologi Kota Binjai**

NO	Jenis UTTP	JUMLAH
1	UTTP Timbangan Pasar	2.259
2	UTTP SPBU	8
3	UTTP Timbangan Jembatan	14
JUMLAH		2.281

➤ **Potensi Produk Unggulan Industri Kota Binjai**

NO	JENIS PRODUK	SATUAN	JUMLAH
1	Anyaman Bambu	Buah	2.393.101
2	Sulaman Border	Potong	149.270
3	Meubel Bambu	Set	87.056
4	Barang-Barang Tekstil	Kodi	921.922
5	Kerupuk/Opak	Bungkus/Kg	140.180.929
6	Tenun	Helai	2.489

I.6. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA(LK) 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum menjelaskan secara ringkas latar belakang, latar belakang, gambaran umum, sumber daya aparatur, keadaan sarana dan prasarana, aspek strategis, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar kinerja tahun yang bersangkutan menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, meliputi RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 2016 – 2021, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. Realisasi anggaran.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

1.7. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Walikota Kota Binjai Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pada prinsipnya Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Binjai dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam melaksanakan tugas sehari – hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik – baiknya untuk mencapai tujuan.

Sejalan dengan itu, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan publik yang baik, sehingga sangat diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi, kredibilitas aparatur serta partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

2.1.1 Tujuan

Tujuan urusan perdagangan telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi Kota Binjai. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan profesionalisme.
2. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
3. Menciptakan hubungan kerja yang kondusif.
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM.
5. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Dan adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penempatan tenaga kerja	orang	275	361	131,27 %
2.	Jumlah calon wirausaha baru	orang	120	60	50 %
3.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	perusahaan	350	361	100 %
4.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	orang	1.050	2.064	196,57 %
5.	Terbitnya UMK	ketetapan	1	1	100 %
6.	Persentase pengembangan industri kreatif	persen	3	2	2 %
7.	Jumlah produk IKM yang di promosikan	produk	8	8	100 %
8.	Tersedianya data IKM	IKM	650	714	110 %
9.	Jumlah pasar dalam keadaan baik	pasar	16	13	81,25 %
10.	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	persen	100	85	85 %
11.	Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok	komoditi	34	34	100 %
12.	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	produk	6	6	100 %

13.	Peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	persen	15	10	10 %
14.	Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut	persen	100	51,56	5,56 %
15.	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	UTTP	2300	675	29,35 %

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang.

Untuk itulah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indicator – indicator keberhasilannya.

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka tingkat capaian kinerja kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah sebagai berikut :

Berikut adalah Perjanjian Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI				TARGET
				I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,	Hasil penilaian SAKIP Disnaker Perindag	%	25	25	25	25	100
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	15	25	25	35	100

	demokratis dan terpercaya							
		Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	%	15	25	25	35	100
		Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik	%	20	20	20	20	80
		Aset kantor yang layak fungsi	%	20	20	20	20	80
		Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu	dokumen	1	-	1	-	2
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	dokumen	1	-	-	-	1
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	Pemenuhan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan untuk hubungan industrial	perusahaan	10	-	5	-	20
		Pemenuhan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan untuk pelatihan	orang	20	20	4	20	100
		Jumlah calon wirausaha baru	orang	2	-	4	2	70
		Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	orang	90	90	90	90	361
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1 s/d AK3	orang	380	380	380	380	1600

		Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP)	pedagang	68	68	68	68	300
4.	Meningkatnya kualitas produktifitas perekonomian kota	Tersedianya data IKM	%	2	-	2	1	5
		Prosentase peningkatan kemampuan IKM yang mendapatkan pelatihan	%	2	-	2	1	5
		Prosentase peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM yang mengikuti pameran	%	2	-	2	1	5
		Jumlah produk IKM yang di promosikan	produk	10	-	-	-	50
		Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok	jenis	10	10	10	4	34
		Jumlah pasar dalam kondisi baik	pasar	17	-	-	-	22
		Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	pasar	1	-	-	-	1

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.

Indikator kinerja dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Binjai dalam melaksanakan program – program selama kurun waktu 2016 – 2020.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2020 disajikan dalam Bab ini.

Penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA) dan RENJA tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara priodik.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi dilihat melalui capaian Indiator Kinerja (IKU) dalam capaian Pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai telah menetapkan indikator persentase lulusan peserta pelatihan yang memiliki keterampilan dan persentase

jumlah masyarakat yang dibina dalam hal ketenagakerjaan dan perindustrian perdagangan. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebagai berikut :

➤ **Tabel Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan	- Jumlah lowongan pekerjaan baru	246 orang	350 orang	361 orang	103 %	350 orang	103 %
		- Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	275 orang	350 orang	326 orang	95 %	326 orang	95 %
		- Besaran upah minimum kota (UMK)	Naik	Naik	Naik	10 %	10 %	10 %

➤ **Tabel Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	- Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1	1500 orang	1600 orang	1523 orang	95 %	1.150	145 %
		- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal	50 %	235 pedagang	273 pedagang	116 %	260 pedagang	116 %

		Penyewa (KPP)						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

➤ **Tabel Sasaran Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Kota**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2020
				Target	Realisasi	Realisasi %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya produktifitas perekonomian kota	- Tersedianya data IKM - Prosentase peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM yang mengikuti pameran - Jumlah produk IKM yang di promosikan	650 IKM 5 % 100 %	1.050 10 % 8 produk	1.523 5 % 8 produk	145 % 5 % 10 %	1.150 20 % 9 produk	145 % 10 % 100 %

	- Pemenuhan informasi harga bahan pangan - Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut - Jumlah pasar dalam kondisi baik - Sampah pasar yang diangkut ke TPA - Terlaksananya kegiatan ukuran takaran	34 jenis 51,56% 4 pasar 13 pasar 949 UTTP	34 jenis 786.952.684 16 pasar 100 % 2259	34 jenis 817.765.045 13 pasar 70 % 675	100 % 103,92 % 81 % 70 % 29 %	34 jenis 100 % 22 pasar 100 % 2320	100 % 103,92 % 81 % 100 % 2320
--	---	---	--	--	---	--	--

		timbangan dan perlengkap nya						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.2 Realisasi Anggaran

Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi amanah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2020 disajikan dalam Bab ini.

Penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020. Sesuai dengan ketenteuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

➤ **Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020**

Program	Kegiatan				Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Penyediaan dana untuk pembayaran air, internet dan rekening listrik	151.750.000	118.447.822	78 %
		Outcome : Terpenuhinya penyelesaian administrasi kantor dan pelayanan kepada masyarakat			
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Terlaksananya administrasi keuangan	113.212.000	113.182.500	99 %
		Outcome : Tercapainya administrasi keuangan yang tepat waktu dan akuntabel			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Terlaksananya jasa kebersihan kantor	21.845.916	20.403.000	93 %
		Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman			

	Penyediaan alat tulis kantor	Output : Penyediaan alat tulis kantor	74.650.910	71.507.290	95 %
		Outcome : Tersedianya alat tulis kantor			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ouput : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.322.965	20.180.000	99 %
		Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			
	Penyediaan makanan dan minuman	Output : Penyediaan makanan dan minuman	20.884.800	20.211.600	96 %
		Outcome : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu			
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : Penyediaan dana rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	37.000.000	36.034.542	97 %
		Outcome : Tersedianya dana dalam melakukan perjalanan dinas ke luar daerah			

	BPJS Ketenagakerjaan	Output : Perlindungan kecelakaan kerja bagi Non PNS	19.800.000	12.426.480	62 %
		Outcome : BPJS ketenagakerjaan Non PNS			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.760.760	50.360.000	99 %
		Outcome : Perlengkapan gedung kantor yang tersedia			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Output : Penyediaan peralatan gedung kantor	51.702.978	51.600.000	99 %
		Outcome : Terpenuhinya pembelian peralatan kantor			
	Pengadaan mebeleur	Output : Penyediaan mebeleur kantor	76.662.720	76.000.000	99 %
		Outcome : Tersedianya mebeleur kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor	40.000.000	69.600.000	99 %
		Outcome : Gedung dan halaman kantor yang terjaga dan terpelihara			

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	245.000.000	227.371.602	92 %
		Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas dalam kondisi yang baik			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000	10.000.000	100 %
		Outcome : Terpeliharanya perlengkapan kantor dalam kondisi baik			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output : Penyediaan dana untuk jasa memperbaiki peralatan kantor yang rusak	31.763.418	31.740.000	99 %
		Outcome : Terpeliharanya peralatan kantor dalam kondisi baik			
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	9.487.120	7.326.500	77 %
		Outcome : Laporan kinerja OPD tahun 2020			

	Penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2021	Output : Terlaksananya penyusunan rencana kerja anggaran	10.212.450	8.498.000	83 %
		Outcome : Dokumen rencana kerja dan anggaran yang tersedia			
Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi pasar kerja	Output : Pelayanan informasi pasar kerja yang terlayani	116.609.850	115.642.500	99 %
		Outcome : Pencari kerja dalam pembuatan AK1, AK2 dan rekomendasi paspor yang terlayani			
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dewan pengupahan	Output : Kegiatan dewan pengupahan yang terlaksana	82.105.240	77.992.800	94 %
		Outcome : Terbitnya upah minimum kota (UMK)			
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Penyelenggaraan promosi dagang tingkat nasional (INACRAFT)	Output : Terlaksananya kegiatan pameran INACRAFT	0	0	0 %
		Outcome : Promosi produk IKM secara nasional			
	Kegiatan pameran asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (APEKSI)	Output : Terlaksananya kegiatan pameran APEKSI	0	0	0 %

		Outcome : Promosi produk IKM antar daerah			
	Kegiatan penyelenggaraan stand Kota Binjai pada pekan raya sumatera utara (PRSU)	Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan stand Kota Binjai pada PRSU	92.744.400	71.390.000	76 %
		Outcome : Promosi produk IKM se Sumatera Utara			
	Kegiatan penyelenggaraan Binjai Nasional Expo (BINNEX)	Output : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Binjai Nasional Expo (BINNEX)	0	0	0%
		Outcome : Promosi produk IKM se Kota Binjai			
	Monitoring harga pangan strategis, pergudangan, penyimpanan barang dan logistik daerah	Output : Menjamin stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok	38.097.680	37.449.000	98 %
		Outcome : Stabilisasi harga kebutuhan pokok			
	Kegiatan pasar murah bahan kebutuhan pokok hari besar idul fitri	Output : Pemberian bantuan subsidi harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar idul fitri	0	0	0 %

		Outcome : Terbentuknya masyarakat Kota Binjai dalam menghadapi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar idul fitri			
	Penertiban dan pengelolaan pasar	Output : Terlaksananya penertiban dan pengelolaan pasar	314.734.200	314.112.000	99 %
		Outcome : Pasar yang tertib dan teratur			
	Peningkatan pelayanan kebersihan pasar	Output : Terlaksananya peningkatan dan pelayanan kebersihan pasar	708.155.000	707.985.400	99 %
		Outcome : Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman			
	Pemberdayaan dan penataan pasar se Kota Binjai	Output : Pemungutan retribusi pasar dan pelayanan penertiban kartu pengenal penyewa (KPP) pasar	229.585.850	227.976.850	99 %
		Outcome : Terpungutnya retribusi pasar dan pelayanan penertiban kartu pengenal penyewa (KPP) pasar			

	Aplikasi dan implementasi GIS pasar	Output : Terlaksananya aplikasi dan implementasi GIS pasar	0	0	0 %
		Outcome : Aplikasi dan implementasi GIS pasar yang tersedia			
	Revitalisasi pasar rakyat (DAK 2019)	Output : Revitalisasi pasar rakyat	191.378.040	191.378.040	100 %
		Outcome : Revitalisasi pasar rakyat terlaksana			
	Penunjang administrasi DAK revitalisasi pasar rakyat	Output : Penunjang administrasi DAK revitalisasi pasar rakyat	3.300.000	0	0 %
		Outcome : Penunjang administrasi DAK pasar rakyat			
	Bantuan untuk pedagang sebagai bentuk penanggulangan dampak pandemi covid - 19	Output : Terlaksananya bantuan untuk pedagang sebagai bentuk penanggulanga n dampak pandemi covid -19	364.625.000	362.350.000	99 %
		Outcome : Bantuan peralatan untuk para pedagang			
	Sosialisasi hasil tembakau dilekati pita cukai palsu di tempat penjualan di Kota Binjai	Output : Terlaksananya sosialisasi hasil tembakau dilekati pita cukai palsu di tempat penjualan di Kota Binjai	50.000.000	0	0%

		Outcome : Pedagang dapat mengetahui pita cukai palsu yang beredar pada perdagangan tembakau di Kota Binjai			
	Pemeliharaan genset pasar rambung	Output : Genset pasar rambung yang terpelihara	25.000.000	22.640.000	90 %
		Outcome : Terawatnya genset pasar rambung			
	Pemeliharaan pasar pujasera	Output : Pasar pujasera yang terlaksana	160.000.000	158.450.000	99 %
		Outcome : Pasar pujasera yang terpelihara			
	Pengadaan infocus pasar rambung	Output : Pengadaan infocus pasar rambung yang terlaksana	10.374.057	9.800.000	94 %
		Outcome : Terpenuhinya fasilitas informasi dan hiburan di pasar rambung			
	Pemeliharaan pasar kebun lada	Output : Pemeliharaan pasar kebun lada	120.000.000	118.621.933	98 %
		Outcome : Pasar kebun lada yang terpelihara			
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tera – tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Output : Pelaksanaan tera-tera UTTP di pasar	37.562.330	25.560.500	68 %

		Outcome : Peneraan alat UTTP di pasar yang terlaksana			
	Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal (DAK 2019)	Output : Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal (DAK 2019)	462.770.000	0	0 %
		Outcome : Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal yang terlaksana			
	Penunjang administrasi DAK penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	Output : Penunjang administrasi DAK penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	6.000.000	0	0 %
		Outcome : Penunjang administrasi DAK penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal yang tersedia			
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Operasional rumah kemasan	Output : Pengadaan mesin digital printing dan bahan untuk kemasan produk IKM	171.039.708	166.186.500	97 %

		Outcome : Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pembuatan label kemasan			
	Revitalisasi rumah kemasan (DAK 2019)	Output : Revitalisasi rumah kemasan (DAK 2019)	132.817.910	132.817.910	100 %
		Outcome : Revitalisasi rumah kemasan yang terlaksana			
	Penunjang administrasi DAK revitalisasi sentra IKM	Output : Penunjang administrasi DAK revitalisasi sentra IKM	9.400.000	0	0 %
		Outcome : Penunjang administrasi DAK revitalisasi sentra IKM yang tersedia			
	Bantuan untuk industri kecil menengah (IKM) dalam rangka peningkatan ekonomi terdampak pandemi covid-19	Output : Terlaksananya bantuan untuk industri kecil menengah (IKM) dalam rangka peningkatan ekonomi terdampak pandemi covid - 19	1.502.687.500	1.486.130.000	98 %

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Tahun 2020 dalam rangka mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Terlepas dari keberhasilan yang diuraikan pada BAB III, kegagalan yang ada perlu segera ditindak lanjuti dengan mencari pemecahan permasalahannya, dan segera mengambil kebijakan untuk mensikapi kendala utama sehingga dapat memperbaiki kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan sesuai target yang ingin dicapai, perlu dilakukan :

1. Perencanaan program kegiatan secara komprehensif.
2. Penempatan dan penambahan personalia (SDM) secara proporsional sesuai analisa beban kerja, untuk instansi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
3. Adanya anggaran dana yang cukup.
4. Tersedianya data yang valid.

Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LKj Tahun 2020 ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada, kiranya dapat memotivasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan datang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai**
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan perindustrian, perdagangan dan pasar
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Penempatan tenaga kerja	Orang	275	361	131,27 %
2.	Jumlah calon wirausaha baru	Orang	120	60	50 %
3.	Jumlah lowongan pekerjaan baru	Perusahaan	350	361	100 %
4.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	1.050	2.064	196,57 %
5.	Terbitnya UMK	Ketetapan	1	1	100 %

6.	Persentase pengembangan industri baru kreatif	Persen	3	2	2 %
7.	Jumlah produk IKM yang di promosikan	Produk	8	8	100 %
8.	Tersedianya data IKM	IKM	650	714	110 %
9.	Jumlah pasar dalam keadaan baik	Pasar	16	13	81,25 %
10.	Sampah pasar yang diangkut ke TPA	Persen	100	85	85 %
11.	Pengumpulan data informasi harga kebutuhan bahan pokok	Komoditi	34	34	100 %
12.	Jumlah produk unggulan yang dipasarkan	Produk	6	6	100 %
13.	Peningkatan penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	Persen	15	10	10 %
14.	Persentase realisasi retribusi pasar yang dipungut	Persen	100	51,56	51,56 %
15.	Terlaksananya kegiatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya	UTTP	2300	675	29,35 %



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HEDI NOVRIA, SH
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.M. IDAHAM, SH. M.Si
Jabatan : WALIKOTA BINJAI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

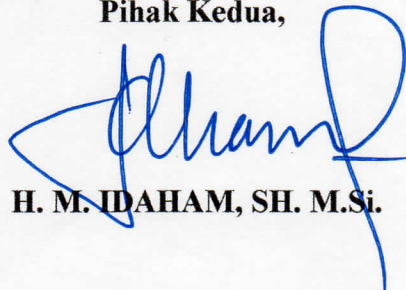
Pihak Pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

2020

Pihak Kedua,


H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

Pihak Pertama,

HEDI NOVRIA, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA) 2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	- Pemenuhan fungsi pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan - Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1, AK2, AK3 dan rekom paspor	2500 orang 1.100 pencaker
3.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja guna peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kerja	- Terbitnya UMK	1 ketetapan
4.	Meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan pasar	- Pasar yang bersih dan nyaman - Sampah pasar yang diangkut ke TPA	22 pasar 100 %
5.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	- Jumlah produk unggulan yang di pasarkan - Penjualan hasil kerajinan IKM melalui kegiatan pameran	6 produk 10 %
6.	Meningkatkan retribusi pasar	- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa di pungut	100 % 1.047.814.246,00

7.	Pengendalian stabilitas harga pangan strategis	- Pengumpulan data informasi harga bahan pangan di pasar - Pemberian subsidi kepada masyarakat untuk pembelian bahan pokok menjelang hari raya idul fitri	34 komoditi 5 kecamatan
8.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTPP	- Terlaksananya kegiatan ukuran timbangan dan perlengkapannya	2 pasar

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	UNIT PENGELOLA	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	444.567.066,00	Disnaker Perindag	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.750.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113.212.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.845.916,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.662.150,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	18.696.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	74.401.000,00	Disnaker Perindag	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.955.618,00		
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50.760.760,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.831.440,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.600.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	205.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.763.418,00	Disnaker Perindag	APBD

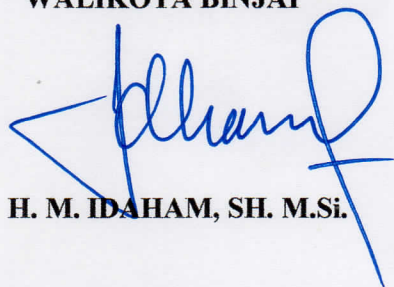
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.908.570,00	Disnaker Perindag	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.891.120,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021	13.017.450,00	Disnaker Perindag	APBD
4.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	116.609.850,00		
	- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	116.609.850,00	Disnaker Perindag	APBD
5.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	82.105.240,00		
	- Dewan Pengupahan	82.105.240,00	Disnaker Perindag	APBD
6.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	171.039.708,00		
	- Operasional Rumah Kemasan	171.039.708,00	Disnaker Perindag	APBD
7.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.973.359.260,00		
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Tingkat Nasional (INACRAFT)	125.156.300,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	112.258.600,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Stand Kota Binjai pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)	92.744.400,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Binjai Nasional Expo (BINNEX)	143.020.040,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Monitoring Harga Pangan Strategis, Pergudangan, Penyimpanan Barang Logistik Daerah	38.097.680,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Hari Besar Idul Fitri	107.397.190,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penertiban dan Pengelolaan Pasar	314.734.200,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	708.155.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemberdayaan dan Penataan	209.585.850,00	Disnaker Perindag	APBD

	Pasar se Kota Binjai - Aplikasi dan Implementasi GIS Pasar	122.210.000,00	Disnaker Perindag	APBD
7.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	77.562.330,00		
	- Tera – Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	77.562.330,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai,

2020

WALIKOTA BINJAI



H. M. IDAHAM, SH. M.Si.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI**



HEDI NOVRIA, SH
PEMBINA
NIP. 19800422 200604 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Jonas Sianturi, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hedi Novria, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Pihak Pertama,

Sekretaris

Ferry Jonas Sianturi, S. Sos
Pembina
Nip. 19650327 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran - Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan - Sarana dan prasarana yang terjaga dengan baik - Aset kantor yang layak fungsi - Penyusunan dokumen perencanaan tahunan tepat waktu - Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 % 3 Dokumen (Renja,RKPD,RKA) 2 Dokumen (lap kinerja, lap. Keuangan)

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	444.567.066,00	Disnaker Perindag	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.750.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	113.212.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.845.916,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.662.150,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	18.696.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	74.401.000,00	Disnaker Perindag	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.955.618,00		

	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.760.760,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	19.831.440,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	26.600.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	205.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	31.763.418,00	Disnaker Perindag	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.908.570,00	Disnaker Perindag	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.891.120,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021	13.017.450,00	Disnaker Perindag	APBD

Pihak Kedua,

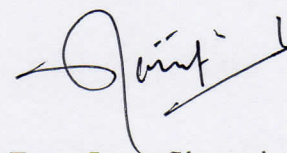
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Binjai, Januari 2020

Pihak Pertama,

Sekretaris



Ferry Jonas Sianturi, S. Sos
Pembina
Nip. 19650327 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratnawaty Saragih, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hedi Novria, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

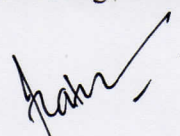
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422/200604 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan


Ratnawaty Saragih, S.Sos
Pembina
Nip. 19670811 198903 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG KETENAGAKERJAAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pelayanan terhadap pencari kerja dalam pembuatan AK1, AK2, AK3 dan rekomendasi paspor	1.800 Pencari Kerja
2.	Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar meningkatnya jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	- Terbitnya UMK - Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja	- 1 Dokumen - 12 Bulan

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	116.609.850,00		
	- Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	116.609.850,00	Disnaker Perindag	APBD
2.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	82.105.240,00		
	- Dewan Pengupahan	82.105.240,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ketenagakerjaan

Ratnawati Saragih, S.Sos
Pembina
Nip. 19670811 198903 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hotlan Jaya Sitorus, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hedi Novria, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perdagangan

Hotlan Jaya Sitorus, SH
Penata TK. I
Nip. 19740314 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG PERDAGANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan pedagang pasar	- Sampah pasar yang diangkut ke TPA	100 %
2.	Meningkatnya promosi produk unggulan daerah	- Promosi produk IKM secara nasional - Promosi produk IKM antar daerah - Promosi produk IKM se Sumatera Utara	20 produk 20 produk 30 produk
3.	Meningkatkan retribusi pasar	- Pelayanan kepada pedagang dalam penerbitan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) - Persentase peningkatan retribusi pasar yang bisa di pungut	100 % 100 %
4.	Pengendalian stabilitas harga barang kebutuhan pokok	- Pengumpulan data - Pemberian subsidi	34 komoditi 5 kecamatan
5.	Melaksanakan pelayanan tera-tera ulang serta pengawasan UTTP	- Pelaksanaan peneraan alat UTTP di pasar	100 persen

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.004.518.590,00		
	- Penyelenggaraan Promosi Dagang Tingkat Nasional (INACRAFT)	125.156.300,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	112.258.600,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Stand Kota Binjai pada	92.744.400,00	Disnaker Perindag	APBD

	Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU)			APBD
	- Kegiatan Penyelenggaraan Binjai Nasional Expo (BINNEX)	143.020.040,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Monitoring Harga Pangan Strategis, Pergudangan, Penyimpanan Barang dan Logistik Daerah	38,097.68000	Disnaker Perindag	
	- Kegiatan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok Hari Besar Idul Fitri	107.397.190,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Penertiban dan Pengelolaan Pasar	314.734.200,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Peningkatan Pelayanan Kebersihan Pasar	708.155.000,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Pemberdayaan dan Penataan Pasar se Kota Binjai	209.585.850,00	Disnaker Perindag	APBD
	- Aplikasi dan Implementasi GIS Pasar	122.210.000,00	Disnaker Perindag	APBD

2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	77.562.330,00		
	- Tera – Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	77.562.330,00	Disnaker Perindag	APBD

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Binjai, Januari 2020

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perdagangan

Hotlan Jaya Sitorus, SH
Penata TK. I
Nip. 19740314 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achyar Rezski Pane, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hedi Novria, SH
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perindustrian

Achyar Rezski Pane, SH
Penata
Nip. 19860724 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIDANG PERINDUSTRIAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOTA BINJAI

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di sektor industri kreatif	- Pengembangan industri baru kreatif - Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pembuatan label kemasan	100 % 20 IKM

	Program / Kegiatan	Anggaran	Unit Pengelola	Keterangan
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	171.039.708,00		
	- Operasional Rumah Kemasan	171.039.708,00	Disnaker Perindag	APBD

Binjai, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Hedi Novria, SH
Pembina
Nip. 19800422 200604 1 005

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perindustrian

Achyar Rezski Pane, SH
Penata
Nip. 19860724 200604 1 002